



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BARNABAS ORNO**
2. Jabatan : **WAKIL GUBERNUR**
3. NHK : **101661**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp.

618.605.000

1. Tanah Seluas 458605 m2 di KAB / KOTA MALUKU BARAT DAYA,
HASIL SENDIRI Rp. 458.605.000
2. Tanah Seluas 2128 m2 di KAB / KOTA MALUKU BARAT DAYA,
HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. Tanah Seluas 16880 m2 di KAB / KOTA MALUKU BARAT DAYA,
HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. Tanah Seluas 1302 m2 di KAB / KOTA MALUKU BARAT DAYA,
HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
5. Tanah Seluas 12593 m2 di KAB / KOTA MALUKU BARAT DAYA,
HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
6. Tanah Seluas 6807 m2 di KAB / KOTA MALUKU BARAT DAYA,
HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
7. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA MALUKU BARAT DAYA,
HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
8. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA MALUKU BARAT DAYA,
HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
9. Tanah Seluas 24000 m2 di KAB / KOTA MALUKU BARAT DAYA,
HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

D. SURAT BERHARGA

Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

983.872.625



F. HARTA LAINNYA	Rp.	1.000.000.000
Sub Total	Rp.	2.602.477.625
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.602.477.625

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.